



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERKEBUNAN

Website : <http://disbun.kutaikartanegara.go.id> Email : disbun@kutaikartanegarakab.go.id

Jl. Muso Bin Salim No. 12 - 13 Telp. (0541) 661073-661954 Fax. (0541) 661954
TENGGARONG Kode Pos 7551

Nomor : B-~~563~~/DISBUN/SET-II/700/12/2022 Tenggarong, 27 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Risiko dan Pelaksanaan Yth. Bupati Kutai Kartanegara
Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Risiko Tahun 2022,----- di
----- Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Risiko dan Hasil Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pelaporan Risiko dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dan selanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 17 yaitu “Identifikasi risiko dilaksanakan dengan; (a) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan

secara komprehensif; (b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan (c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko”. dan pada Pasal 18 yaitu (a) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. (b) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko pada ayat (1) bahwa kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP. Dan pada ayat (2) Implementasi RTP sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan; a. Pembangunan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan/atau prosedur; b. Pelaksanaan Kebijakan dan/atau prosedur pengendalian.

Pelaksanaan RTP Risiko tersebut, dimaksudkan untuk meminimalisasi ketidakpastian yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasil penilaian risiko pada sasaran strategis, program dan kegiatan dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil dilaksanakan untuk meminimalkan kemungkinan kejadian, menurunkan dampak kejadian, menurunkan level risiko dan mengoptimalkan capaian target indikator tujuan, capaian target indikator sasaran strategis, capaian indikator program dan capaian indikator kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko:

Tujuan pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil identifikasi risiko, hasil analisis dan hasil penyusunan RTP Risiko sesuai dengan proses bisnis kegiatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kegiatan.
2. Mengetahui kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan
3. Mengetahui Kendala pelaksanaan pengendalian dan risiko sisa setelah pelaksanaan pengendalian.
4. Memberikan saran dan rekomendasi penanganan risiko lebih lanjut atas kejadian risiko yang masih terdapat risiko sisa.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7):

5. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 34):
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. SNI 8615 ISO 31000 Manajemen Risiko-Prinsip-Prinsip dan Pedoman.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Risiko strategis dan Risiko operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2.1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemen Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

a. Visi dan Misi Inspektorat

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Insfrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan”.

Indikator Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel

Indikator Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator Tujuan	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan (Persen)	2,20

Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator :
Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator :
Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun, dengan indikator :
NTP Perkebunan (%)

Tabel

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022
1	Produksi Sawit Rakyat (Ton)	267.635
2	Produksi Sawit PBS (Ton)	2.924.513
3	Produksi Karet (Ton)	9.238
4	Produksi Lada (Ton)	1.815
5	Produksi Kelapa (Ton)	2.510
6	Produksi Kopi (Ton)	8
7	Produksi Kakao (Ton)	34
8	Produksi Aren (Ton)	392
9	Produksi Kelor (Ton)	6
10	Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	14.067
11	Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	17.130
12	Produktivitas Karet (Kg/Ha)	943
13	Produktivitas Lada (Kg/Ha)	639

14	Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	441
15	Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	331
16	Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	681
17	Produktivitas Aren (Kg/Ha)	2.658
18	Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.233
19	NTP Perkebunan (%)	98

c. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Indikator Out Put

Dalam mewujudkan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2022 di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun program dengan indikator hasil (out put) sesuai Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel
Program, Kegiatan Indikator, Target dan Jumlah Anggaran

No	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,50 Nilai	23.734.531.710
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	336.343.500
	(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	164.071.500
	(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	48.832.500
	(3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	123.439.500

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	19.793.496.032
	(4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	19.565.376.032
	(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	228.120.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	121.400.000
	(6) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	81.660.000
	(7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	39.740.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-
	(8) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan	225.000.000 Rupiah	-
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	119.761.200
	(9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	81.771.200
	(10) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	37.990.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	874.761.913
	(11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Jenis	10.000.000
	(12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis	163.992.475

		(13)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Jenis	26.464.438
		(14)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	55.020.000
		(15)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	3.600 Eksemplar	-
		(16)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Makan Minum Rapat	460 Orang/Hari 1.481 Kotak	544.660.000
		(17)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1.352 Berkas	74.625.000
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.918.105.005
		(18)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber	12 Bulan	315.809.542
		(19)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	80.000.000
		(20)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 2. Jumlah pameran yang diikuti 3. Jumlah pengelolaan Website	12 Bulan 2 Kali 1 Kegiatan	1.522.295.463
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	104 Unit	570.664.060
		(21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	103 Unit	400.000.000
		(22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	170.664.060

II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28.570 Ha	4.365.000.000
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	214.116 Ha	
			3. Luas Areal Karet	17.898 Ha	
			4. Luas Areal Lada	3.402 Ha	
			5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.286 Ha	
			6. Luas Areal Kopi	78 Ha	
			7. Luas Areal Kakao	80 Ha	
			8. Luas Areal Aren	237 Ha	
			9. Luas Areal Kelor	5 Ha	
	9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	408 Paket	4.115.000.000
		(23) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas pengadaan bibit & herbisida	31 Ha	4.115.000.000
			Luas pengadaan	185 Ha	
			Jumlah pengadaan alat panen dan pasca	60 Unit	
			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	72 Orang	
			Luas pemeliharaan Kebun Dinas	17 Ha	
			Jumlah pengadaan benih	20.000 Benih	
	10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	2 Komoditi	250.000.000
		(24) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1 Kegiatan	125.000.000
		(25) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Kegiatan	125.000.000
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	3.600 Meter	3.515.000.000
			2. Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	3 Unit	
	11	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	2 Dokumen	350.000.000
		(26) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	150.000.000

		(27)	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan	1 Dokumen	200.000.000
	12	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	20	3.165.000.000
		(28)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	3 unit	1.500.000.000
		(29)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun/ Direhabilitasi dan Dipelihara	3.600 meter	1.530.000.000
		(30)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi	4 unit	135.000.000
IV	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	86,67 Persen	450.000.000
	13	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	200 Ha	450.000.000
		(31)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan	60 Ha	150.000.000
		(32)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam areal IUP Perkebunan yang dikelola	22 Ha	150.000.000
		(33)	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	10 Kelompok Tani	150.000.000
				2. Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi	10 Kasus	
V	PERIZINAN USAHA PERTANIAN			1) Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	400.000.000
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	11 Surat (PUP)		
	14	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Ditina	211 Pelaku	400.000.000
		(34)	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1) Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB	200 Surat (STDB)	400.000.000
				2) Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	11 Surat (PUP)	

VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	4,77 Persen	500.000.000
	15	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	47 Lembaga	500.000.000
		(35) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1) Jumlah Kelompok Tani yang dibina	5 Kelompok Tani	350.000.000
		(36) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra	2 Lembaga	150.000.000
JUMLAH					32.964.531.710,00

d. **Pengelola Manajemen Risiko**

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dibentuk Unit Pengelola Risiko (UPR)/Tim Satgas Manajemen Risiko pada Tahun 2022 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-750/DISBUN/SET-II/700/04/2022 Tanggal 12 April 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel
Susunan Tim Manajemen Risiko Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Ir. Muhamad Taufik NIP. 19670625 199203 1 007	Kepala Dinas Perkebunan	Penanggung Jawab
2	M. Taufik Rahmani, SP., MP NIP. 19701103 199803 1 010	Kepala Bidang Produksi	Ketua

3	Ir. Syahrianto, MM NIP. 19640711 199403 1 006	Kepala Bidang Perlindungan	Anggota 1
4	H. Samsiar, S.Hut., M.Si NIP. 19741231 199703 1 008	Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan	Anggota 2
5	Rudiyanto Hamli, SP NIP. 19730718 200012 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Areal	Anggota 3
6	Dayang Eva Srie. D, S.Hut NIP. 19740722 200701 2 016	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota 4
7	Yuli Darmayani, SE NIP. 19780712 199803 2 003	Kasub. Bag. Umum dan Ketatalaksanaan	Anggota 5
8	Kuntari Nip. 19651217 198602 2 002	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian	Anggota 6
9	Deni Hersandi, SH Nip. 19800924 201001 1 015	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota 7
10	John Laurens Barus, SE Nip. 19760901 201101 1 001	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota 8
11	Rusmansyah Putra NIP. 19840401 201001 1 023	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota 9

Tugas Unit Pengelola Risiko/Tim Satgas Pengelola Manajemen Risiko

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

2.2. Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel

Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.

b. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah mengenai Kriteria Penilaian dan Analisis Atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan

keputusan mengenai Tingkat Risiko yang dapat diterima maupun Tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan Respon Penanganan lebih lanjut. Kriteria Penilaian Risiko terdiri 3 Komponen, yaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Dampak Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

c. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tabel

Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

d. Skala Dampak Risiko

Tabel

Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak					
	Kerugian Negara		Penurunan Reputasi		Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 juta	Keluhan secara lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Stakeholder langsung ke organisasi	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode

Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5 Juta s.d Rp10 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq 25\%$	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode.

e. Skala Nilai Risiko

Tabel
Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

f. Kriteria Tingkat Risiko

Gambar
Matriks Tingkat Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Pengelompokan Prioritas Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel

Pengelompokan prioritas Tingkat Risiko

Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah sedang	4
9 – 12	Kuning	Sedang tinggi	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

g. Kriteria Tingkat Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel

Pemetaan Tingkat Risiko, selera Risiko, Toleransi Risiko dan Eskalasi Tindakan

Tingkat Risiko		Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi dan perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi ke pimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.
Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun responsif.		Perlu perhatian pimpinan organisasi, pengendalian eskalasi ke pimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang rendah		Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.
Rendah		Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.

3.1 Identifikasi Risiko

Hasil identifikasi Risiko menurut Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 berikut:

Hasil identifikasi Risiko Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pemetaan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UCC	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ yang terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomis Sub Sektor Perkebunan	2.20	32.964.531.710		Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2021	Produk komoditi perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2021	Internal	C	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kunai Kartengara lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2021	Kapala Dinas Perkebunan
							Harga seluruh atau sebagian komoditi perkebunan lebih rendah dari forecast atau tahun 2021	Eksternal	UC		
	Sasaran : Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	267.635	31.614.531.710							
	Sasaran : Meningkatkan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)	14.067	850.000.000							
	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Perkebun	NTP Perkebunan (%)	98	500.000.000							

3.1.2 Risiko Operasional Program Perangkat Daerah

Hasil identifikasi Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 dapat dilihat pada

Tabel berikut :

Tabel

Hasil identifikasi Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	U/C/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,5	23.734.531.710		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak memenuhi Target	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa komponen yang menjadi kriteria penilaian	eksternal/internal	C	Tidak tercapainya target SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Kabupaten	Sekretaris
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Sawit Rakyat (Ha)	28.570	4.165.000.000		Keterlambatan penyuluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	1. Terlambat melakukan koordinasi pemantauan dan pemetaan CPCL 2. Terlambat dalam peninjauan penyediaan barang	Internal dan eksternal	C	Sarana produksi (pupuk, benih dan alsintan) tidak dapat dimanfaatkan sesuai waktu yang dibutuhkan	PPTK Sub Koord Sarana & Prasarana/Kabid Produksi & Kabid PP
		Luas Areal Sawit PBS (Ha)	214.116								
		Luas Areal Karet (Ha)	17.898				3. Keterlambatan penyediaan menyebarkan hasil pekerjaan pengadaan				
		Luas Areal Lada (Ha)	3.402			Tidak terlaksananya penyuluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	1. Tidak terlaksananya peninjauan penyediaan barang 2. Penyediaan wari prestasi	Internal dan Eksternal	C	Pemerintah mantri yang telah ditetapkan tidak memperoleh bantuan sarana produksi	PPTK Sub Koord Sarana & Prasarana/Kabid Produksi & Kabid PP
		Luas Areal Kelapa (Ha)	7.286								
		Luas Areal Kopi (Ha)	78			Terdapat pekebun yang tidak memsuaikan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/menahangrkananya	1. Sikap mental pekebun yang tidak bertanggung jawab	Internal dan Eksternal	C	Hasil produksi tidak optimal	PPTK Sub Koord Sarana & Prasarana/Kabid Produksi & Kabid PP

	Luas Areal Kakao (Ha)	80				2. Kurangnya dorongan dan pendampingan dari PPTL/petugas lapangan				
	Luas Areal Aren (Ha)	237				3. Pekerjaan kesulitan biaya untuk membuat menyipkan lahan				
	Luas Areal Kelor (Ha)	5			Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun	1. Bibit yang disalurkan membawa bibit penyakit karena benihnya	Internal dan eksternal	C	Hasil produksi tidak optimal	PPTK Sub Koord Pengembangan Areal/Kabid Kabid PP
						2. Bibit yang diterima tidak disimpan dan dirawat dengan baik oleh penerima				
						3. Pekebun terlalu lama menyimpan bibit sebelum ditanam				
					Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	1. Tanaman tidak dirawat dengan baik oleh pekebun	Ekssternal & Internal	C	Hasil produksi tidak optimal	PPTK Sub Koord Pengembangan Areal/Kabid PP
						2. Kurangnya dorongan dan pendampingan dari PPTL/petugas lapangan				
						3. Bibit yang disalurkan dan ditanam tidak memenuhi standar mutu				
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.600	3.515.000.000		1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diprojektikan	1. Kondisi cuaca (curah hujan tinggi)	Ekssternal & Internal	C	Tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan	PPTK Sub Koord Sarana & Prasarana/Kabid Produksi
	Jumlah Embung Yang Dibangun (Unit)	3				2. Keterbatasan dalam peninjauan penyedia dan atau pemeliharaan kontrak				
						3. Pelaksanaan pekerjaan tidak komitmen dalam melaksanakan kontrak				

					2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	1. Terbatasnya kompetensi petugas terkait ilmu konstruksi/belum adanya petugas yang memiliki kompetensi dalam ilmu/bidang konstruksi untuk menilai hasil pekerjaan 2. Pelaksanaan pekerjaan tidak komitmen dalam melaksanakan kontrak 3. Kurang maksimalnya peran pihak pengawas pekerjaan (fasilitator untuk pekerjaan swakelola jalan produksi) 4. Kamalkan harga bahan material 5. Rendahnya kemampuan SDM pengurus kelompok baru pelaksana swakelola pekerjaan penbangunan jalan produksi	Internal/Eksternal	C	1. Konstruksi mudah/cepat rusak 2. Tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
					3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/ desain)	1. Kurang maksimalnya peran pengawas 2. Kesalahan dalam perencanaan (mal desain) 3. Kamalkan harga bahan material 4. Kualitas konstruksi tidak sesuai standar disebabkan kesegajaan penyedia	Eksternal	C	1. Bangunan runtuh/tidak berfungsi sepenuhnya atau pada bagian tertentu 2. Tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
4	Pengendalian Dan Pemangulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan (Parsen)	86,67	450.000.000	Tidak tercapainya luas pengendalian OPT sesuai target	1. Kurang tersedianya sarana pengendalian 2. Kurangnya petugas pengenal dan Pengendali OPT 3. Kurang aktifnya	Internal/Eksternal	C	Produksi dan Produktivitas rendah	PA/KPA

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	123.435.500		Tertambahnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	Data yang ada kurang akurat	Internal	C	Tidak tersumanya dokumen evaluasi kinerja OPD yang akurat	PPTK/Sub koord PPK/Sekretaris Dinas
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	19.565.376.032		Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapat Error pada Aplikasi/terringan pada saat proses input administrasi	Eksternal	C	Keterlambatan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	PPTK/Sub koord PPK/Sekretaris Dinas
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15	228.120.000		Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akurat	Terdapat Error pada Aplikasi/terringan pada saat proses input administrasi	Eksternal	C	Tertambahnya Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan	PPTK/Sub koord PPK/Sekretaris Dinas
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	81.660.000		Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	Belum terlaksananya koordinasi secara maksimal	Internal	C	Tertambahnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PPTK/Kasir bagian Umul/Sekretaris Dinas
7	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan pemenuhan	1	39.740.000		Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	Adanya Mutasi Barang Milik Daerah Dalam Unit Kerja	Internal	C	Tertambahnya Penyusunan Laporan Pemenuhan BMD	PPTK/Kasir bagian Umul/Sekretaris Dinas
8	Pelaporan Pengeluaran Kebutuhan Daerah	Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan	225.000.000	-							
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	81.771.200		Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	Ketersediaan sebagian SDM Lainnya Pelaksana Kurang Kompeten Dalam Menyampaikan Materi	Eksternal	UC	Kurang maksimal materi yang didapatkan	PPTK/Sub koord. Kopegawain/Secretaris Dinas
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	37.990.000		Tertambahnya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya perubahan regulasi	Eksternal	UC	SDN bertahap dan kompeten kurang tersedia	PPTK/Kasir bagian Umul/Sekretaris Dinas
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	10.000.000		Tidak Sesuai komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tidak tersedianya barang sesuai diperlukan	Eksternal	UC	Barang yang diperlukan tidak tersedia	PPTK/Kasir bagian Umul/Sekretaris Dinas
12	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah jenis Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32	163.992.475		Tidak Sesuai jenis Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tidak tersedianya barang sesuai diperlukan	Internal	C	Barang yang diperlukan tidak tersedia	PPTK/Kasir bagian Umul/Sekretaris Dinas
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	26.464.438		Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	Harga pasaran lebih tinggi dari SHS	Eksternal	UC	Kualitas barang kurang baik	PPTK/Kasir bagian Umul/Sekretaris Dinas

14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	55.020.000	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	Pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan monitoring secara maksimal	Internal	C	Biaya melebihi pagu	PPTK/Kasu bag Umum/Sekt eraris Dinas
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	3.610	-						
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	460	544.660.000	Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa dilaksanakan	Adanya Rasionalisasi	Eksternal	UC	Sebagian Perjalanan Dinas Tidak Terakomodir	PPTK/Kasu bag Umum/Sekt eraris Dinas
		Jumlah Makan Minum Rapat	1.431		Tidak semua makan minum rapat konsumsi terakomodir	Tidak terwadainya anggaran sesuai dengan alur kas dan kurangnya anggaran	Eksternal	UC	Tidak terakomodirnya makan minum rapat	PPTK/Kasu bag Umum/Sekt eraris Dinas
17	Pembusahan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (U/PPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1.352	74.625.000	kurang maksimalnya pengelolaan arsip	Masih kurangnya SDM di bidang kearsipan yang kompeten	Internal	C	Kurang tertatanya arsip dinas secara maksimal	PPTK/Kasu bag Umum/Sekt eraris Dinas
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	315.809.542	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembeayaan, listrik, air, telepon dengan pencatatan dana yang tersedia	Kerangka Tarif dasar air, listrik, telepon	Eksternal	UC	Terdapat kurang bayar yang mengakibatkan STS	PPTK/Kasu bag Umum/Sekt eraris Dinas
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	80.000.000	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak sesuai dengan aturan pakai	Internal	C	Banyaknya Sarana dan prasarana yang rusak baik rusak ringan maupun rusak berat (AC, Genet, Komputer, Laptop, Printer)	PPTK/Kasu bag Umum/Sekt eraris Dinas
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung rron PNS	12	1.522.295.463	Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kematian	Terdapat Perubahan Kebutuhan perencanaan dari Pemerintah Pusat/Propinsi karena suatu kondisi tertentu	Eksternal	UC	Tidak terpenunhinya kebutuhan tenaga administrasi, kebersihan, keamanan dan supir Non -ASN	PPTK/Sub Koord. Kepengawia n/Sekretaris Dinas
		Jumlah pameran yang diikuti	2		Tidak terlaksananya beberapa kegiatan even pameran atau promosi luar dan dalam daerah	Terdapat Perubahan Kebutuhan perencanaan dari Pemerintah Pusat/Propinsi karena suatu kondisi tertentu	Eksternal	C	Pelaksanaan pameran yang diikuti tidak sesuai target	PPTK/Sub Koord. Pengolahan dan Pemasaran Hasil/Sekret eris Dinas

	Jumlah pengelolaan Website	1			Pengelolaan website OPD kurang maksimal	Terdapatnya SDM pengelola website	Internal	C	Data dan informasi website kurang update/berkembang	PPTK/Kasub bag Umil/Sekr etaris Dinas
21	Perbedaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	193	400.000.000	Tidak semua kendaraan dinas bisa diakomodir pemeliharaannya	Jumlah kendaraan, Usia kendaraan yang relatif sudah tua dan mobilitas yang tinggi	Internal	C	Sarana yang digunakan tidak dalam kondisi baik dan tidak siap digunakan	PPTK/Kasub bag Umil/Sekr etaris Dinas
22	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki/direhabilitasi	1	170.664.060	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	Minimnya SDM petugas pelaksanaan kegiatan	Eksternal	C	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	PPTK/Kasub bag Umil/Sekr etaris Dinas
23	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas pengadaan bibit & herbisida	31	4.115.000.000	Keterlambatan penyediaan bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	1. Terlambat melakukan koordinasi penuntutan dan penutupan CPCL 2. Terlambat dalam penuntutan penyediaan barang 3. Keterlambatan penyediaan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan	Internal dan Eksternal	C	Sarana produksi (pupuk, benih dan asintan) tidak dapat dimanfaatkan sesuai waktu yang dibutuhkan	PPTK/Sub Koord. Sarana & Prasarana/K abid Produksi & K abid PP
		Luas pengadaan pupuk	181							
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	60							
		Jumlah Pakechun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	72		Tidak terlaksananya penyediaan bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	1. Tidak terlaksananya penuntutan penyediaan barang	Internal dan Eksternal	C	Penerima manfaat yang telah ditetapkan tidak memperoleh bantuan sarana produksi	PPTK/Sub Koord. Sarana & Prasarana/K abid Produksi & K abid PP
		Luas pemeliharaan Kebun Dinas	17			2. Penyediaan wari prestasi				
		Jumlah pengadaan benih	20000		Terdapat pakechun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik-tan atau menjual/menundahkangkannya	1. Sifat rental pakechun yang tidak bertanggung jawab	Internal dan Eksternal	C	Hasil produksi tidak optimal	PPTK/Sub Koord. Sarana & Prasarana/K abid Produksi & K abid PP

						2. Kurangnya dorongan dan pendampingan dari PPT/petugas lapangan				
						3. Pakebn kesulitan biaya untuk membuka/menyiapkan lahan				
					Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pakebn	1. Bibit yang disalurkan membawa bibit penakit/hama tanaman 2. Bibit yang diterima tidak disimpan dan dirawat dengan baik oleh penerima 3. Pakebn terlalu lama menyimpan bibit sebelum ditanam 1. Tanaman tidak dirawat dengan baik oleh pakebn	Internal dan Eksternal	C	Hasil produksi tidak optimal	PPTK/Sub Koord. Pengembangan Areal/Kabid Kabid PP
					Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	2. Kurangnya dorongan dan pendampingan dari PPT/petugas lapangan 3. Bibit yang disalurkan dan ditanam tidak memenuhi standar mutu Tidak terdapatnya varietas di Kantoran Pertanian RI	Eksternal & Internal	C	Tidak adanya perlindungan terhadap varietas tanaman	PPTK/Sub Koord. Perbenihan/Kabid PP
24	Pengamanan Komunitas dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pengamanan Komunitas dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1	125.000,000			Internal & Eksternal	C	Tidak adanya perlindungan terhadap varietas tanaman	PPTK/Sub Koord. Perbenihan/Kabid PP
25	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	125.000,000	Pembiayaan dan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman pakebnan tidak maksimal	Kurangnya tenaga pengawasan benih pakebnan	Internal & Eksternal	C	Beradaanya benih tanaman pakebnan yang ilegal (palsu)	PPTK/Sub Koord. Perbenihan/Kabid PP

						swakelola jalan (produk)				
						4. Kemaknaan harga bahan material				
						5. Rendahnya kemampuan SDM pengurus kelompok tani pelaksana swakelola pekerjaan pembangunan jalan produksi				
					3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain).	1. Kurang maksimalnya peran pengawasan	Eksternal	C	1. Bangunan runtuh/tidak berfungsi sepenuhnya atau pada bagian tertentu	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/ Kabid Produksi
						2. Kesalahan dalam perencanaan (mal desain)			2. Tidak tercapainya target peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	
						3. Ketepatan harga bahan material				
						4. Kualitas konstruksi tidak sesuai standar disebabkan kesengajaan penyedia				
31	Pengendalian Organisasi Pengganggu Turnbulan (OPT) Teraman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan	60	150.000.000	1. Tidak terlaksananya penggunaan dan gerakan pengendalian OPT	1. Ketersediaan tenaga teknis Pengamat dan Pengendali OPT	Internal & Eksternal	C	Tidak tercapainya target peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	PPTK/Sub Koord. Pengamanan & Pengendalian OPT/Kabid Rafindunga
						2. Tidak tersedianya sarana untuk pengendalian OPT secara memadai				
						3. Ketersediaan motivasi pekebun melakukan pengendalian OPT				

						bertasaskan rekomendasi teknis hasil pengamatan oleh petugas				PPTK/Sub Koord. Pengamatan & Pengendalian OPI/Kabid Perindungan
					2. Kesalahan Penggunaan OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangannya	1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengamat	Internal & Eksternal	C	Keselahan dalam menentukan dan melakukan gerakan pengendalian OPT	
32	Pemangaran Dampak Penambahan Lahan (DPP) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Areal Berhimpit Konservasi Tinggi (ANKT) dalam areal UUP Perkebunan yang dikelola	22.030	150.000.000	Tidak optimalnya pengelolaan ANKT di dalam areal UUP oleh perusahaan perkebunan	1. Belum tersosialisasinya secara komprehensif Peraturan Gubernur Kalimantan No. 43/2021 Tentang Pengelolaan ANKT di Area Perkebunan dan Keputusan Bupati Kutai No. 475/SK-BUP/HK/2021 Tentang Peraturan ANKT di Dalam Kawasan Perkebunan	Internal & Eksternal	UC	Terganggunya keseimbangan dan kestabilan ekosistem esensial pada area perkebunan serta punahnya jenis tumbuhan dan satwa liar	PPTK/Sub Koord. Pengendalian Lingkungan /Kabid Perindungan
						2. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki RPP (Rencana Pengelolaan dan Pemertan) ANKT				
						3. Masih kurangnya komitmen Pimpinan Perusahaan Perkebunan dalam pengelolaan ANKT				
33	Pencegahan, Pemangaran Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Peranti Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	10	150.000.000	Meningkatnya Kebakaran Lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	Masih rendahnya kesadaran pekebun dalam menjaga lahan dan kebun dari kebakaran	Eksternal	UC	Tingginya resiko kebakaran lahan dan kebun	PPTK/Sub Koord. Pengendalian Lingkungan /Kabid

		Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi	10						Belum terlaksananya Fasilitas Gangguan Usaha Perkebunan yang disebabkan baik oleh bencana alam dan manusia		Tingginya gangguan usaha perkebunan	Pelindungan n
34	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pekebuhan yung mendapatkan STDB	290	400.000.000					1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendapatkan usaha budidayanya 2. Aplikasi sTDB Online tidak berfungsi dengan baik	Masih kurangnya sosialisasi kepada pekebun tentang Peraturan Bupati No. tenjang Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Internal & Eksternal	Cakupan pemberian STDB kepada pekebun rendah	pPTK/Sub Koord. Pembinaan dan Gangguan Usaha/Kabid Usaha dan Penyuluhan
									1. Kemampuan online tidak berfungsi dengan baik 2. Aplikasi sTDB Online tidak berfungsi dengan baik	Internal & Eksternal	Pemeliharaan STDB secara online tidak teraksana	pPTK/Sub Koord. Pembinaan dan Gangguan Usaha/Kabid Usaha dan Penyuluhan
									1. Isian data dan penyusunan administrasi permohonan STDB tidak lengkap dan atau tidak valid. 2. Verifikasi permohonan tidak cermat.	Internal & Eksternal	Munculnya keluhan dari pihak-pihak tertentu	pPTK/Sub Koord. Pembinaan dan Gangguan Usaha/Kabid Usaha dan Penyuluhan
									4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak lengkap	Internal & Eksternal	Peta kebun sebagai lampiran STDB tidak akurat	pPTK/Sub Koord. Pembinaan dan Gangguan Usaha/Kabi

									d Usaha dan Penyuluhan

						2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk semua kegiatan sub kegiatan secara cermat	Memadai	Efektif	
						3. Melakukan perencanaan penyelesaian administrasi umum yang terkait dengan PBJ (KAK, SK, PPTK, PPK, Pjangkatan, Input RUP, dll)	Memadai	Efektif	
						4. Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan program kegiatan secara internal maupun dengan pihak-pihak terkait	Memadai	Efektif	
						5. Verifikasi usulan dari kelompok lain secara cermat dan mendapatkan penting sesuai hasil verifikasi	Memadai	Efektif	
						6. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan proses pengadaan dan persiapan penyedia barang/jasa serta pendampingan kontrak pengadaan	Memadai	Efektif	
						7. Melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga sebelum diterima	Memadai	Efektif	
						8. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap pekebun/ompok pekebun dalam pengelolaan usaha	Memadai	Efektif	
						9. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara rutin per 3 (tiga) bulan dan secara insentif	Memadai	Efektif	

3.2.2 Analisis Risiko Program

Hasil Analisis Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel

Hasil Analisis Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (keputusan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/Tidak Efektif	
	Nilai SAKIP Peringkat Daerah Tidak memenuhi target	2	2	4	Rendah	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektoriat sudah ditindaklanjuti	Memadai	Efektif	Tidak
	Keterlambatan penyuluran bahan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	2	2	4	Rendah	1. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, penempatan dan penyalangan CPCL 2. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka, UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan penyalangan CPCL 3. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia	Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
	Tidak terak samanya penyuluran bahan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	2	2	4	Rendah	1. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk memenuhi isi perjanjian 1. Melakukan koordinasi dan kelengkapan dokumen pengadaan dan HPS	Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
	Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/menundahkannya	1	1	2	Rendah	1. Verifikasi dan penertarikan CPCL dilakukan secara keat	Memadai	Efektif	Ada

						2. Sosial sasi kepada calon penerima sebelum penyairhan bantuan	Memadai	Efektif	Ada
						3. Pemberian motivasi dan pendampingan pemanfaatan bantuan secara optimal	Memadai	Efektif	Ada
	Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun	2	2	4	Rendah	1. Pemeriksaan mutu bibit sebelum disalurkan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli	Memadai	Efektif	Ada
						2. Pemberian dorongan dan pengawasan kepada pekebun untuk melakukan penyimpanan dan perawatan bibit yang diterima dengan baik serta agar cepat ditanam	Memadai	Efektif	Ada
	Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	1	1	2	Rendah	1. Pemberian dorongan, bimbingan dan pengawasan yang intensif oleh PPL/ petugas lapangan 2. Bantuan teknis budidaya kepada pekebun 3. Pemeriksaan mutu bibit sebelum disalurkan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli	Memadai	Efektif	Ada
						1. Melakukan percepatan kegiatan administrasi umum persiapan pengadaaan (KAK, input RUP, SK PPTK, PPK, PJ, Pengadaan di padu bin. Januari)	Memadai	Efektif	Ada
	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperkirakan	2	2	4	Rendah	2. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPOL 3. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka, UPTD PJR dan PPL dalam rangka percepatan penantapan CPOL 4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Rejda Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia	Memadai	Efektif	Ada
						5. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk memenuhi isi perjanjian	Memadai	Efektif	Ada
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	2	2	4	Rendah	1. Melakukan telaah/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil	Memadai	Efektif	Ada

						perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual	Memadai	Efektif	Ada
						2. Menyapkan secara cermat dokumen pengadaaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/reviw hasil perencanaan	Memadai	Efektif	Ada
						3. Memberikan dorongan, penantuan dan evaluasi secara berkala maupun insidenil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak	Memadai	Efektif	Ada
						4. Memberikan dorongan, penantuan dan evaluasi secara berkala maupun insidenil kepada pengawas	Memadai	Efektif	Ada
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi desain)	1	2	2	Rendah	1. Melakukan telaahan/reviw secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual	Memadai	Efektif	Ada
						2. Menyapkan secara cermat dokumen pengadaaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/reviw hasil perencanaan	Memadai	Efektif	Ada
						3. Memberikan dorongan, penantuan dan evaluasi secara berkala maupun insidenil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak	Memadai	Efektif	Ada
						4. Memberikan dorongan, penantuan dan evaluasi secara berkala maupun insidenil kepada pengawas	Memadai	Efektif	Ada
						Identifikasi data kelompok tani yang mengalami gangguan OPT	Memadai	Tidak Efektif	Ada
	Memungkanya persentase gangguan OPT	2	2	4	Rendah	Sosialisasi dan Pengambilan tnik koordinat terkait STDB	Memadai	Tidak efektif	Ada
	Kurangnya Pakehun yang mendapatkan STDB	2	2	4	Rendah	Penyegaran SDM terkait PLJP	Memadai	Tidak efektif	Ada
	Perusahaan yang mendapat Sertifikat tidak sesuai target	2	2	4	Rendah	Pendataan peserta Sosialisasi	Memadai	Tidak efektif	Ada
	Tidak Bertumbuhnya Kemandirian Persentase Kelas Kelompok Tani (Parsen)	2	2	4	Rendah		Memadai	Tidak efektif	Ada

3.2.3 Analisis Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Hasil Analisis Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Keputusan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ tingkat risiko		Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
	Tidak tersumnya Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	2	2	4	Rendah	Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait	Memadai	Tidak Efektif	Ada
	Tidak Tersumnya Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2	2	4	Rendah	Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait	Memadai	Efektif	Tidak
	Tertambahnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan pemangku jabatan (Bidang/Sekretariat)	Memadai	Tidak Efektif	Ada
	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan	Memadai	Efektif	Tidak
	Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akumulabel	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan	Memadai	Efektif	Ada
	Data Rekorisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	2	2	4	Rendah	Koordinasi antara unit Kerja	Memadai	Efektif	Ada
	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	2	2	4	Rendah	Koordinasi antara unit Kerja	Memadai	Efektif	Ada
	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan Instansi Terkait	Memadai	Efektif	Ada
	Tertambahnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan Instansi Terkait	Memadai	Efektif	Ada
	Tidak Sesuainya Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disediakan	2	2	4	Rendah	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Memadai	Efektif	Ada
	Tidak Sesuainya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	2	4	Rendah	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Memadai	Efektif	Ada
	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	2	2	4	Rendah	Melakukan survey barang	Memadai	Efektif	Ada
	Dokumen/berkas yang di copy/cetak melebihi volume	2	2	4	Rendah	Melakukan monitoring secara berapay	Memadai	Efektif	Tidak
	Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa diakomodir	2	2	4	Rendah	Meminimalisir Perjalanan Dinas Sesuai Keperluan	Memadai	Efektif	Ada

	Tidak semua malian minum mapik/konsumsi terkemodir	2	2	4	Rendah	Berkordinasi dan berkoordinasi dalam percepatan ketersediaan anggaran	Memadai	Efektif	Tidak
	kurang maksimalnya pengelolaan asip	2	2	4	Rendah	Melaksanakan Bimtek Kearsipan	Memadai	Efektif	Tidak
	Kurang sinkronnya tarif bagian pembayarat, listrik, air, telepon dengan pen-sairan dana yang tersedia	2	2	4	Rendah	Kordinasi dengan pihak terkait (Kantor Pos, PLN, PDAM, Telkom)	Memadai	Efektif	Tidak
	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	2	2	4	Rendah	Menggunakan peralatan sesuai dengan aturan pakai	Memadai	Efektif	Tidak
	Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kesehatan	2	2	4	Rendah	Memaksanakan Tenaga Yang ada Baik ASN maupun Non ASN	Memadai	Efektif	Tidak
	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan even pameran atau promosi luar dan dalam daerah	2	2	4	Rendah	Melakukan koordinasi pada pihak terkait pelaksanaan pameran yang akan dihi uti	Memadai	Efektif	Tidak
	Pengelolaan website OPD kurang maksimal	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian pengelolaan website	Memadai	Efektif	Ada
	Tidak semua kendaraan dinas bisa terkemodir pemeliharaan-nya	2	2	4	Rendah	Melakukan perawatan kendaraan dinas yang digunakan	Memadai	Efektif	Ada
	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	2	2	4	Rendah	Monitoring pelaksanaan kegiatan	Memadai	Efektif	Ada
	Keterlambatan penyuluran bangunan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	2	2	4	Rendah	1. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantauan dan penyalpan CPCL 2. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka, UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan penantuan CPCL 3. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Tokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia 4. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk memenuhi isi perjanjian	Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
	Tidak terlaksananya penyuluran bangunan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	2	2	4	Rendah	1. Meningkatkan kesermetan dan keakuratan dalam penyiapan dokumen pengadaan dan HPS 2. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Tokja Pengadaan terkait proses pengadaan dan penunjukan penyedia	Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada

[illegible]

						2. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, penamtapan dan penetapan C/PCL	Memadai	Efektif	Ada
						3. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka, UPTD PJR dan PPL dalam rangka percepatan penamtapan C/PCL	Memadai	Efektif	Ada
						4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia	Memadai	Efektif	Ada
						5. Melakukan koordinasi, penamtapan dan dorongan kepada penyedia untuk memenuhi isi perjanjian	Memadai	Efektif	Ada
2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	2	2	4	Rendah	1. Melakukan telaahan/reviw secara cermat bersama konsultan pemana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstrukturnya yang disesuaikan dengan kondisi teaktual	Memadai	Efektif	Ada	
					2. Menyajikan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/reviw hasil perencanaan	Memadai	Efektif	Ada	
					3. Memberikan dorongan, penamtapan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak	Memadai	Efektif	Ada	
					4. Memberikan dorongan, penamtapan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pengawas	Memadai	Efektif	Ada	
3. Kegagalan konstruksi (Gagal konstruksi/fungsional desain).	1	2	2	Rendah	1. Melakukan telaahan/reviw secara cermat bersama konsultan pemana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teaktual	Memadai	Efektif	Ada	
					2. Menyajikan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/reviw hasil perencanaan	Memadai	Efektif	Ada	

						3. Memberikan dorongan, pemenuhan dan evaluasi secara berkala maupun insidenil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak	Memadai	Efektif	Ada
						4. Memberikan dorongan, pemenuhan dan evaluasi secara berkala maupun insidenil kepada pengawas	Memadai	Efektif	Ada
	1. Tidak terlaksananya pengamanan dan gerakan pengendalian OPT	2	3	6	Rendah sedang	1. Melakukan pemutakhiran data jenis dan luas kebun yang mengalami serangan OPT	Memadai	Efektif	Ada
						2. Melakukan koordinasi dengan Disbun Prov. Kalimantan untuk memfasilitasi penyediaan dan insentif bagi petugas Pengamat dan Pengendali OPT serta Sarana Pengendalian	Memadai	Efektif	Ada
						3. Penyelenggaraan sarana pengendalian dalam jumlah dan jenis yang memadai (sesuai kebutuhan)	Memadai	Efektif	Ada
						4. Aktif memberikan dorongan dan pendampingan serta fasilitasi kepada pekebun dalam melakukan gerakan pengendalian gangguan OPT	Memadai	Efektif	Ada
	2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan	2	3	6	Rendah sedang	1. Mengkategorikan Petugas Pengamat dan Pengendali OPT dalam pelatihan bimtek yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten	Memadai	Efektif	Ada
						2. Berkoordinasi dan mengusulkan kepada Disbun Prov. Kalimantan dan atau Kementerian Pertanian untuk menglokasikan Pelatihan Bimtek bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT	Memadai	Efektif	Ada
	Tidak optimalnya pengelolaan ANKT di dalam areal U/P oleh perusahaan perkebunan	2	2	4	Rendah	1. Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Kaltara No. 43/2021 Tentang Pengelolaan ANKT di Area Perkebunan dan Kepunasan Eupati Kekar No. 475/SK-BUP/HK/2021 tentang Penetapan ANKT di Dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan bekerjasama dengan Disbun Prov. Kalimantan dan pihak-pihak terkait	Memadai	Efektif	Ada

						2. Melakukan work shop Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ANKT kepada devisi lingkungan perusahaan perkebunan bekerjasama dengan DiskumProv. Kalimantan pilak-pilak terkait	Memadai	Efektif	Ada
						3. Pendampingan dan Pembinaan Kepada Pemegang IUP yang memiliki areal ANKT	Memadai	Efektif	Ada
	Memungkanya Kshikaran Lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	2	2	4	Rendah	Metakukan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran lahan dan kebun dengan semua stakeholder terkait	Memadai	Efektif	Ada
						Metakukan Koordinasi dan Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dengan semua stakeholder terkait			
						Sosialisasi dan Pendidikan terkait STDB	Memadai	Efektif	Ada
	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk melindungi usia budidayanya	2	3	6	Rendah sedang	1. Melakukan perawatan dan pemeliharaan aplikasi	Memadai	Efektif	Ada
	2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik	3	2	6	Rendah sedang	2. Meminjak tenaga admin dan memberikan pembekalan	Memadai	Efektif	
						1. Melakukan pendampingan kepada pekebun dalam pengisian data dan kelengkapan administrasi permohonan STDB	Memadai	Efektif	Ada
	3. Data dalam STDB tidak valid	2	3	6	Rendah sedang	2. Melakukan verifikasi secara cermat	Memadai	Efektif	
						1. Memanbah tenaga pemetaan	Memadai	Efektif	Ada
	4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak lengkap	2	3	6	Rendah sedang	2. Memberikan bimbingan teknis kepada tenaga pemetaan GIS	Memadai	Efektif	
						1. Mengkuiserikan tenaga PUP yang ada pada Penyegaran Petugas PUP dan menguisasikan perpanjangan Sertifikat PUP	Memadai	Efektif	Ada
	Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	2	2	4	Rendah	1. Mengingkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan BPP, Pendes/Kelurahan, KITNA, UPT P3R, PPI)	Memadai	Efektif	Ada
	1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal	3	3	9	Sedang tinggi	2. Memanfaatkan PPI yang berada di bawah Disanak	Memadai	Efektif	Ada
						Memingkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan BPP, Pendes/Kelurahan, KITNA, UPT P3R, PPI)	Memadai	Efektif	Ada
	2. Keterseratan kehadiran pekebun rendah	2	3	6	Rendah sedang	Memingkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan BPP, Pendes/Kelurahan, KITNA, UPT P3R, PPI)	Memadai	Efektif	Ada

	3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang	3	3	9	Sedang tinggi	1. Mendorong PPL untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan kualitas metode pendampingan 2. Mengkulturkan PPL dalam kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi	Memadai	Efektif	Ada
	4. Ketercapaian pekebun miltentel dalam kegiatan pembinaan rendah	2	3	6	Rendah sedang	1. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya peran pekebun miltentel dalam pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan 2. Meningkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan BPP, Ponds/Kelurahan, KITNA, UPT P3R, PPL)	Memadai	Efektif	Ada
							Memadai	Efektif	Ada
	Facilitasi dan pendampingan pembentukan dan pembinaan Badan usaha Milik Petani tidak maksimal	2	2	4	Rendah	Pembekalan/Bimtek fasilitator/PPL tentang Badan Usaha Milik Petani	Memadai	Efektif	Ada
						2. Sosialisasi kepada pekebun dan pengunr lembaga pekebun	Memadai	Efektif	Ada

3.3 Evaluasi Risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan. Evaluasi risiko meliputi proses perbandingan hasil analisis dari masing-masing risiko terhadap kriteria risiko yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah suatu tindakan lebih lanjut terhadap risiko tersebut diperlukan. Kondisi tersebut mengarah pada keputusan untuk:

- Tidak melakukan apa-apa
- Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko
- Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik.
- Mempertahankan pengendalian risiko yang ada
- Mempertimbangkan ulang sasaran proses.

Hasil analisis terhadap risiko yang teridentifikasi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya dilakukan evaluasi dan ditentukan Prioritas Penanganan Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Tabel berikut:

3.3.1 Evaluasi Risiko Strategis

Tabel

Evaluasi Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Risiko	Perlakuan (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
	Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2021	6	Rendah sedang	1		Mitigasi

3.3.2 Evaluasi Risiko Program

Tabel

Evaluasi Risiko Program

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko
	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan, 2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan, 3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahtangkannya, 4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun, 5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	4	Rendah	1	Mitigasi
	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan, 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/ desain)	4	Rendah	2	Mitigasi
	1. Kurangnya Pekebun yang mendapatkan STDB, 2. Perusahaan yang mendapat Sertifikat tidak sesuai target	4	Rendah	3	Mitigasi
	Tidak tercapainya luas pengendalian OPT sesuai target	4	Rendah	4	Mitigasi
	Tidak Bertambahnya Kenaikan Persentase Kelas Kelompok Tani (Persen)	4	Rendah	5	Mitigasi
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak memenuhi Target	4	Rendah	6	Diterima

3.3.3 Evaluasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel

Evaluasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko
	1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal 2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun rendah 3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang 4. Keikutsertaan pekebun milenial dalam kegiatan pembinaan rendah	9	Sedang tinggi	1	Mitigasi
	1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal 2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun rendah 3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang 4. Keikutsertaan pekebun milenial dalam kegiatan pembinaan rendah	9	Sedang tinggi	2	Mitigasi
	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendaftarkan usaha budidayanya 2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik 3. Data dalam STDB tidak valid 4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak lengkap 5. Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	6	Rendah sedang	3	Mitigasi
	1. Tidak terlaksananya pengamatan dan gerakan pengendalian OPT 2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan	6	Rendah sedang	4	Mitigasi
	Tidak optimalnya pengelolaan ANKT di dalam areal IUP oleh perusahaan perkebunan	4	Rendah	5	Mitigasi
	Meningkatnya Kebakaran Lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	4	Rendah	6	Mitigasi
	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahtangkannya 4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun 5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	4	Rendah	7	Mitigasi

	Belum jelasnya kepemilikan varietas tanaman.	4	Rendah	8	Mitigasi
	Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman perkebunan tidak maksimal	4	Rendah	9	Mitigasi
	Belum tersedianya dokumen perencanaan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4	Rendah	10	Mitigasi
	Belum tersedianya dokumen masterplan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	11	Mitigasi
		4	Rendah	12	Mitigasi
	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	4	Rendah	13	Mitigasi
	Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain).	2	Rendah	14	Mitigasi
	Fasilitasi dan pendampingan pembentukan dan pembinaan Badan usaha Milik Petani tidak maksimal	4	Rendah	15	Mitigasi
	Tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	4	Rendah	16	Mitigasi
	Tidak Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rendah	17	Diterima
	Terlambatnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	4	Rendah	18	Mitigasi
	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4	Rendah	19	Diterima
	Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akuntabel	4	Rendah	20	Diterima
	Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	4	Rendah	21	Mitigasi
	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	4	Rendah	22	Mitigasi
	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	4	Rendah	23	Mitigasi
	Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Rendah	24	Mitigasi
	Tidak Sesuainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Rendah	25	Mitigasi
	Tidak Sesuainya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Rendah	26	Mitigasi
	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	4	Rendah	27	Mitigasi
	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	4	Rendah	28	Diterima
	1. Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa diakomodir 2. Tidak semua makan minum rapat/konsumsi terakomodir	4	Rendah	29	Mitigasi
	kurang maksimalnya pengelolaan arsip	4	Rendah	30	Diterima
	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Rendah	31	Diterima
	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	4	Rendah	32	Diterima
	1. Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kematian 2. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan even pameran atau promosi luar dan dalam	4	Rendah	33	Diterima

	daerah 3. Pengelolaan website OPD kurang maksimal				
	Tidak semua kendaraan dinas bisa terakomodir pemeliharaannya	4	Rendah	34	Mitigasi
	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	4	Rendah	35	Mitigasi

3.4 Peta Risiko

3.4.1 Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Gambar

Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

3.4.2 Pemetaan Penanganan Risiko Program

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program
Matriks Peta Risiko

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

3.4.3 Pemetaan Penanganan Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan
Matriks Peta Risiko

Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

4.1 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, selanjutnya dilakukan pendampingan terhadap perlakuan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Perangkat Daerah dengan Hasil seperti Tabel berikut:

Tabel

Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
	Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2021	6	Mitigasi	1. Menyusun renja sesuai dengan Renstra dan memperhatikan usulan dan kebutuhan nyata dari masyarakat pekebun serta dibahas mendalam secara internal maupun dengan pihak-pihak eksternal yg terkait 2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk semua kegiatan/sub kegiatan secara cermat 3. Melakukan percepatan penyelesaian administrasi umum yang terkait dengan PBJ (KAK, SK PPTK, PPK, PjPengadaan, Input RUP, dll) 4. Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan program/kegiatan secara internal maupun dengan pihak-pihak terkait 5. Verifikasi usulan dari kelompok tani secara cermat dan penetapan penerima sesuai hasil verifikasi 6. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan proses pengadaan dan penetapan penyedia barang/jasa serta penandatanganan kontrak pengadaan 7. Melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga sebelum diterima 8. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan terhadap pekebun/kelompok pekebun dalam pengelolaan usaha 9. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara rutin per 3 (tiga) bulan dan secara insentil	Bulan Pebruari - Desember 2022	Sekretaris Dinas Perkebunan

4.2 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program

Tabel

Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak memenuhi Target	4	Diterima	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat sudah ditindaklanjuti	Bulan Januari – Desember 2022	Sekretariat
	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan, 2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan, 3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahtangankan nya, 4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun, 5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	4	Mitigasi	1. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, penantapan dan penetapan CPCL 2. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL 3. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia 4. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk mematuhi isi perjanjian 5. Meningkatkan kecermatan dan keakuratan dalam penyiapan dokumen pengadaan dan HPS 6. Verifikasi dan pemantapan CPCL dilakukan secara ketat 7. Sosialisasi kepada calon penerima sebelum penyaluran bantuan 8. Pemberian motivasi dan pendampingan pemanfaatan bantuan secara optimal 9. Pemeriksaan mutu bibit sebelum disalurkan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli 10. Pemberian dorongan dan pengawalan kepada pekebun untuk melakukan penyimpanan dan perawatan bibit yang diterima dengan baik serta agar cepat ditanam 11. Pemberian dorongan, bimbingan dan pengawalan yang intensif oleh PPL/ petugas lapang 12. Bimbingan teknis budidaya kepada pekebun	Bulan April – Desember 2022	Bidang Produksi; Bidang Pengembangan & Perbenihan
	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan, 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai	4	Mitigasi	1. Melakukan percepatan kegiatan administrasi umum persiapan pengadaan (KAK, input	Bulan April – Desember 2022	Bidang Produksi

	dengan spesifikasi teknis, 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/ desain)			RUP, SK PPTK, PPK, Pj. Pengadaan dll pada bln Januari) 2. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL 3. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL 4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia 5. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk mematuhi isi perjanjian 6. Melakukan telaahan/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual 7. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/review hasil perencanaan 8. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak 9. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pengawas		
	1. Tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan 2. Kesalahan dalam menentukan dan melakukan gerakan pengendalian OPT	4	Mitigasi	1. Melakukan pemutakhiran data jenis dan luas kebun yang mengalami serangan OPT 2. Melakukan koordinasi dengan Disbun Prov. Kaltim untuk memfasilitasi penyediaan dan insentif bagi petugas Pengamat dan Pengendali OPT serta Sarana Pengendalian 3. Penyediaan sarana pengendalian dalam jumlah dan jenis yang memadai (sesuai kebutuhan) 4. Aktif memberikan dorongan dan pendampingan serta fasilitasi kepada pekebun dalam melakukan gerakan pengendalian gangguan OPT	Bulan Maret – Desember 2022	Bidang Perlindungan

				5. Mengikutsertakan Petugas Pengemata dan Pengendali OPT dalam pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten 6. Berkoordinasi dan mengusulkan kepada Disbun Prov. Kaltim dan atau Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan Pelatihan/Bimtek bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT		
	1. Kurangnya Pekebun yang mendapatkan STDB, 2. Perusahaan yang mendapat Sertifikat tidak sesuai target	4	Mitigasi	1. Sosialisasi dan pengambilan titik koordinat terkait STDB 2. Penyebaran SDM terkait PUP	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Usaha dan Penyuluhan
	Tidak Bertambahnya Kenaikan Persentase Kelas Kelompok Tani (Persen)	4	Mitigasi	Pendaftaran peserta Sosialisasi	Bulan Juni – Oktober 2022	Bidang Usaha dan Penyuluhan

4.3. Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel

Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
	Tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	4	Mitigasi	Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait	Bulan Januari – Maret, Agustus – Oktober 2022	Sekretariat
	Tidak Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Diterima	Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait	Bulan Januari – Maret, Oktober – Desember 2022	Sekretariat
	Tertambatnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	4	Mitigasi	Koordinasi dengan pemangku jabatan (Bidang/Sekretariat)	Bulan Maret, Juni, September, Desember 2022	Sekretariat
	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4	Diterima	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan	Bulan Januari – Desember 2022	Sekretariat
	Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akuntabel	4	Diterima	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan	Bulan Januari – Desember 2022	Sekretariat
	Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	4	Mitigasi	Melaksanakan Rekonsiliasi Antara BMD dan Keuangan	Bulan Maret, Juni, September, Desember 2022	Sekretariat
	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja	Bulan Juni dan Oktober 2022	Sekretariat
	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja	Bulan Agustus - Nopember 2022	Sekretariat

	Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja	Bulan Mei - Oktober 2022	Sekretariat
	Tidak Sesuaianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja	Bulan Januari - Mei 2022	Sekretariat
	Tidak Sesuaianya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja	Bulan Pebruari - Maret 2022	Sekretariat
	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	4	Diterima	Melakukan survey barang	Bulan Mei 2022	Sekretariat
	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	4	Mitigasi	Melakukan monitoring secara bertahap	Bulan Maret, Juni, September, Desember 2022	Sekretariat
	1. Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa diakomodir 2. Tidak semua makan minum rapat/konsumsi terakomodir	4	Mitigasi	1. Meminimalisir Perjalanan Dinas Sesuai Kepentingan 2. Berkordinasi dan berkonsultasi dalam percepatan ketersediaan anggaran	Bulan Januari - Desember 2022	Sekretariat
	Kurang maksimalnya pengelolaan arsip	4	Mitigasi	Melaksanakan Bimtek Kearsipan	Bulan Maret, Juni, September, Desember 2022	Sekretariat
	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Mitigasi	Koordinasi dengan pihak terkait (Kantor Pos, PLN, PDAM, Telkom)	Bulan Januari - Desember 2022	Sekretariat
	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	4	Diterima	Menggunakan peralatan sesuai dengan aturan pakai	Bulan Januari - Desember 2022	Sekretariat
	1. Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kematian 2. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan even pameran atau promosi luar dan dalam daerah 3. Pengelolaan website OPD kurang maksimal	4	Mitigasi	1. Memaksimalkan Tenaga Yang ada Baik ASN maupun Non ASN 2. Melakukan koordinasi pada pihak terkait pelaksana pameran yang akan diikuti 3. Koodinasi dengan pihak terkait, melakukan pelatihan pengelolaan website	Bulan Januari - Desember 2022	Sekretariat
	Tidak semua kendaraan dinas bisa terakomodir pemeliharaannya	4	Mitigasi	Melakukan perawatan kendaraan dinas yang digunakan	Bulan Januari - Desember 2022	Sekretariat
	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	4	Mitigasi	Monitoring pelaksanaan kegiatan	Bulan Pebruari - Juli 2022	Sekretariat
	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahtangkannya 4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun 5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	4	Mitigasi	1. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL 2. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPID P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL 3. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia 4. Melakukan	Bulan April - Desember 2022	Bidang Produksi

				koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk mematuhi isi perjanjian 5. Meningkatkan kecermatan dan keakuratan dalam penyiapan dokumen pengadaan dan HPS 6. Verifikasi dan pemantapan CPCL dilakukan secara ketat 7. Sosialisasi kepada calon penerima sebelum penyaluran bantuan 8. Pemberian motivasi dan pendampingan pemanfaatan bantuan secara optimal 9. Pemeriksaan mutu bibit sebelum disalurkan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli 10. Pemberian dorongan dan pengawalan kepada pekebun untuk melakukan penyimpanan dan perawatan bibit yang diterima dengan baik serta agar cepat ditanam 11. Pemberian dorongan, bimbingan dan pengawalan yang intensif oleh PPL/ petugas lapang 12. Bimbingan teknis budidaya kepada pekebun		
	Belum jelasnya kepemilikan varietas tanaman.	4	Mitigasi	Berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten.	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Pengembangan & Perbenihan
	Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman perkebunan tidak maksimal	4	Mitigasi	Berkoordinasi dengan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kaltim	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Pengembangan & Perbenihan
	Belum tersediannya dokumen perencanaan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4	Mitigasi	Berkoordinasi dengan konsultan Perencana	Bulan Januari – Maret 2022	Bidang Pengembangan & Perbenihan
	Belum tersediannya dokumen masterplan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	4	Mitigasi	Berkoordinasi dan Berkonsultasi Stakeholder Terkait	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Pengembangan & Perbenihan
	Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Mitigasi	1. Melakukan percepatan kegiatan administrasi umum persiapan pengadaan (KAK, input RUP, SK PPTK, PPK, Pj. Pengadaan dll pada hln Januari) 2. Melakukan percepatan koordinasi dengan	Bulan Juli – Desember 2022	Bidang Produksi

				pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL. 3. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL. 4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia. 5. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk mematuhi isi perjanjian.		
	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	4	Mitigasi	1. Melakukan telaahan/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual. 2. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/review hasil perencanaan. 3. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak. 4. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pengawas.	Bulan April – Desember 2022	Bidang Produksi
	Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain).	2	Mitigasi	1. Melakukan telaahan/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan	Bulan April – Desember 2022	Bidang Produksi

				2. kondisi teraktual Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaaan (RKS) berdasarkan hasil telaahan/review hasil perencanaan 3. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak 4. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil kepada pengawas		
	1. Tidak terlaksananya pengamatan dan gerakan pengendalian OPT 2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan	6	Mitigasi	1. Melakukan pemutakhiran data jenis dan luas kebun yang mengalami serangan OPT 2. Melakukan koordinasi dengan Disbun Prov. Kaltim untuk memfasilitasi penyediaan dan insentif bagi petugas Pengamat dan Pengendali OPT serta Sarana Pengendalian 3. Penyediaan sarana pengendalian dalam jumlah dan jenis yang memadai (sesuai kebutuhan) 4. Aktif memberikan dorongan dan pendampingan serta fasilitas kepada pekebun dalam melakukan gerakan pengendalian gangguan OPT 5. Mengikutsertakan Petugas Pengamat dan Pengendali OPT dalam pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten 6. Berkoordinasi dan mengusulkan kepada Disbun Prov. Kaltim dan atau Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan Pelatihan/Bimtek bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT	Bulan Maret – Desember 2022	Bidang Perlindungan
	Tidak optimalnya pengelolaan ANKT di dalam areal IUP oleh perusahaan perkebunan	4	Mitigasi	1. Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Kaltim No. 43/2021	Bulan April – Desember 2022	Bidang Perlindungan

				Tentang Pengelolaan ANKT di Area Perkebunan dan Keputusan Bupati Kukar No. 475/SK-BUP/HK/2021 Tentang Penetapan ANKT di Dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan bekerjasama dengan DisbunProv. Kaltim dan pihak-pihak terkait 2. Melakukan workshop Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ANKT kepada divisi lingkungan perusahaan perkebunan bekerjasama dengan DisbunProv. Kaltim dan pihak-pihak terkait 3. Pendampingan dan Pembinaan Kepada Pemegang IUP yang memiliki areal ANKT		
	Meningkatnya Kebakaran Lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	4	Mitigasi	1. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran lahan dan kebun dengan semua stakeholder terkait 2. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dengan semua stakeholder terkait	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Perlindungan
	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendaftarkan usaha budidayanya 2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik 3. Data dalam STDB tidak valid 4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak lengkap 5. Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	6	Mitigasi	1. Sosialisasi dan Pendataan terkait STDB 2. Melakukan perawatan dan pemutakhiran aplikasi 3. Menunjuk tenaga admin dan memberikan pembekalan 4. Melakukan pendampingan kepada pekebun dalam pengisian data dan kelengkapan administrasi permohonan STDB 5. Melakukan verifikasi secara cermat 6. Menambah tenaga pemetaan 7. Memberikan bimbingan teknis	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Usaha dan Penyuluhan

				kepada tenaga pemetaan/GIS 8. Mengikutsertakan tenaga PUP yang ada pada Penyegaran Petugas PUP dan mengusulkan perpanjangan Sertifikat PUP		
	1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal 2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun rendah 3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang 4. Keikutsertaan pekebun milenial dalam kegiatan pembinaan rendah	9	Mitigasi	1. Meningkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan BPP, Pemdes/Kelurahan, KTNA, UPT P3R, PPL) 2. Memanfaatkan PPL yang berada di bawah Distanak 3. Mendorong PPL untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan kualitas metoda pendampingan 4. Mengikutsertakan PPL dalam kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi 5. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya peran pekebun milenial dalam pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Usaha dan Penyuluhan
	Fasilitasi dan pendampingan pembentukan dan pembinaan Badan usaha Milik Petani tidak maksimal	4	Mitigasi	1. Pembekalan/Bimtek fasilitator/PPL tentang Badan Usaha Milik Petani 2. Sosialisasi kepada pekebun dan pengurus lembaga pekebun	Bulan Januari – Desember 2022	Bidang Usaha dan Penyuluhan

BAB IV PEMANTAUAN (MONITORING)

5.1 Pemantauan Risiko

Pendampingan penyusunan Jadwal Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko pada (Perangkat Daerah) dapat dilihat pada Tabel berikut:

5.1 Pemantauan RTP Risiko Strategis

Tabel

Pemantauan RTP Risiko Strategis

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Melakukan evaluasi secara cermat terhadap komponen-komponen belanja yang tidak mendesak dan satuan biaya dalam RKAD/DPA yang tidak sesuai dengan kondisi terkini		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Dinas Perkebunan	Kepala Dinas Perkebunan
2. Mengusulkan pergeseran dan atau perubahan belanja berdasarkan hasil evaluasi														
3. Melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment kepada pekebun penerima bantuan, PPL dan UPTD														

5.2 Pemantauan RTP Risiko Program

Tabel

Pemantauan RTP Risiko Program

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	Sekretaris Dinas Perkebunan
1. Menerapkan sanksi kepada penyedia yang terlambat menyerahkan hasil				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Produksi, Bidang Pengembangan & Perbenihan	PPTK/Sub Koord. Sarana & Prasarana, Sub Koord. Pengembangan

pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku															Areal /Kabid Produksi & Kabid PP
2. Melakukan survey harga dan spesifikasi barang secara cermat dan terbaru															
3. Menerapkan sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan kepada pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan dengan baik															
4. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun lainnya															
5. Menerapkan sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan kepada pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan dengan baik															
1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi	
2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima															
3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia															
4. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima															
5. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia															
1. Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok tani			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan	PA/KPA	
2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT															
1. Pengambilan titik koordinat dan pengajuan STDB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Usaha dan Penyuluhan	PA/KPA	
2. Analisa data dan Administrasi, Peninjauan Lapangan, dan penerbitan surat terkait PUP															
Sosialisasi, Pendampingan dan Pembinaan					√	√	√	√	√				Bidang Usaha dan Penyuluhan	PA/KPA	

5.3 Pemantauan RTP Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Tabel

Pemantauan RTP Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Penyesuaian terhadap Program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam Program prioritas	√	√	√					√	√	√			Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Membua Kertas Kerja Laporan Keuangan dan Kertas Kerja Manajemen Risiko	√	√	√							√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Melaksanakan Kegiatan Sinkronisasi Data Keseluruh UPT P3R yang ada di Kecamatan			√			√			√			√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Melakukan Rekon Data Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Memhual Laporan Keuangan Berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Melaksanakan Rekonsiliasi Antara BMD dan Keuangan			√			√			√			√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Perlu adanya pendataan ulang terkait data BMD Ke Bidang, Sekretariat dan UPT di 18 Kecamatan						√				√			Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Mengupdate Regulasi								√	√	√	√		Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Mengupdate Regulasi					√	√	√	√	√	√			Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan Survey Barang	√	√	√	√	√								Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan Survey Barang		√	√										Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Pembelian barang menyesuaikan dengan harga pasar pada saat ini					√								Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Koordinasi kepada penyedia			√			√			√			√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
1. Memilah kegiatan yang penting untuk dihadiri 2. Selektif dalam memfasilitasi makan minum rapat dan mengajukan usulan penambahan anggaran di perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait			√			√			√			√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas

Verifikasi jumlah tagihan Listrik, air dan telepon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan pengecek peralatan dan perlengkapan kantor secara continue	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
1. Mengupdate Regulasi 2. Perlu adanya koordinasi dan konsultasi pada pihak terkait	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord. Kepegawaian, Sub Koord. Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kasubbag Umtal /Sekretaris Dinas
Perlu adanya Perbaikan terhadap kendaraan yang rusak baik berat maupun ringan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Usulan pendampingan petugas dari dinas teknis		√	√	√	√	√	√							Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
1. Menerapkan sanksi kepada penyedia yang terlambat menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melakukan survey harga dan spesifikasi barang secara cermat dan terbaru 3. Menerapkan sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan kepada pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan dengan baik 4. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun lainnya 5. Menerapkan sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan kepada pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan dengan baik				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord. Sarana & Prasarana, Sub Koord. Pengembangan Areal /Kabid Produksi & Kabid PP
Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian RI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pengembangan dan Perbenihan	PPTK/Sub Koord. Perbenihan/Kabid Kabid PP
Sosialisasi penggunaan benih unggul bersertifikat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pengembangan dan Perbenihan	PPTK/Sub Koord. Perbenihan/Kabid Kabid PP
Survey lokasi	√	√	√											Bidang Pengembangan dan Perbenihan	PPTK/Sub Penyiapan Lahan/Kabid Kabid PP
Melakukan Identifikasi, Pengumpulan Data dan Penyiapan Bahan Penyusunan masterplan Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pengembangan dan Perbenihan Bidang Produksi	PPTK/Sub Penyiapan Lahan/Kabid Kabid PP PPTK/Sub Koord Sarana & Prasarana/Kabid Produksi

1. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima 2. Menetapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia				√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
1. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima 2. Menetapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia				√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
1. Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok tani 2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT			√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan	PPTK/Sub Koord. Pengamatan & Pengendalian OPT/Kabid Perlindungan
Mewajibkan Pimpinan perusahaan besar perkebunan (PBS) untuk menetapkan ANKT di dalam areal IUP masing-masing PBS dengan Keputusan Direktur				√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan	PPTK/Sub Koord. Pengendalian Lingkungan/Kabid Perlindungan
Perlu diadakan Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pemasangan spanduk himbauan kebakaran lahan, dan membentuk serta memaksimalkan Kelompok tani Peduli api yang ada di kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan	PPTK/Sub Koord. Pengendalian Lingkungan/Kabid Perlindungan
1. Sosialisasi kepada aparat pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah kecamatan serta PFL 2. Pembekalan kepada tenaga penginput data usulan dari petugas UPTD dan desa/kelurahan 3. Evaluasi Petunjuk Teknis Verifikasi usulan STDB 4. Bekerjasama dengan petugas pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan pemetaan 5. Mengusulkan dan berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan terkait dengan Pelatihan Tenaga PUP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Usaha dan Penyuluhan	PPTK/Sub Koord. Pembinaan dan Gangguan Usaha/Kabid Usaha dan Penyuluhan

1. Melaksanakan rapat/pertemuan secara berkala dengan Koordinator BPP dan PPL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Usaha dan Penyuluhan	PPTK/Sub Koord. Penyuluhan/Kabid Usaha dan Penyuluhan
2. Melakukan komunikasi yang intens dengan pekebun melalui grup WA															
3. Menerapkan sistem reward and punishment kepada PPL															
Membangun koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Usaha dan Penyuluhan	PPTK/Sub Koord. Pengolahan dan Pemasaran Hasil/Kabid Usaha dan Penyuluhan

BAB VI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, sesuai dengan Risiko yang telah diidentifikasi dan telah menjadi Prioritas Penanganan Risiko yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sesuai dengan Tabel berikut:

1. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko

Tabel

Pelaksanaan Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

[illegible]

2. Hambatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang belum teridentifikasi dalam Daftar Risiko Tahun 2022

Tabel

Hambatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Output Tahun 2022		Hambatan/Kendala yang dihadapi yang belum tertuang dalam Daftar Risiko Tahun 2022	Pengendalian yang telah dilaksanakan
			Fisik (%)	Keuangan (%)		
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	91.81		
	(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	89.62		
	(3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	94.82		
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
	(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	85.46		
	(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100	91.91		
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>					
	(1)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100		
	(2)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	99.52		
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					
	(1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	100		
	(2)	Bimbingan Teknis	100	39.06		

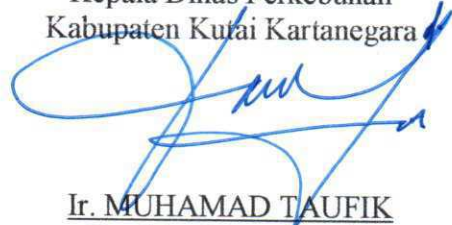
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		(1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99.98		
		(2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	95.15		
		(3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	99.22		
		(4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	100		
		(5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99.79		
		(6)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	99.62		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		(1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	89.79		
		(2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	98.59		
		(3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	94.21		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		(1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	98.12		
		(2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99.79		
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
		(1)	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	88.61		
	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
		(1)	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	100	95.70		
		(2)	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100	99.44		
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian					

	(1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	100	97.66		
	(2)	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	100	72.58		
2	Pembangunan Prasarana Pertanian					
	(1)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	100	70.91		
	(2)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100	95.13		
	(3)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	100	96.08		
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota				
	(1)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	99.35		
	(2)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	99.73		
	(3)	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	79.86		
V	Program Perizinan Usaha Pertanian					
	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	(1)	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	100	95.09		
VI	Program Penyuluhan Pertanian					
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
	(1)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100	86.75		
	(2)	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	100	64.33		
		Jumlah				

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disampaikan Kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Bidang Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara.

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. MUHAMAD TAUFIK

Pembina Utama Muda

NIP. 19670625 199203 1 007

Tembusan Kepada Yth

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**

Lampiran Surat Nomor : B- ~~4563~~DISBUN/SET-II/700/12/2022
Tanggal : 27 Desember 2022

1. SK Pembentukan Unit Pengelola Risiko/Satgas Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
2. Dokumen Kebijakan/Infrastruktur Pengendalian Output dan atau Out Put Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Risiko yang dilaksanakan kesatu
3. Dokumen Kebijakan/Infrastruktur Pengendalian Output dan atau Out Put Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Risiko yang dilaksanakan kedua
4. Dokumen Kebijakan/Infrastruktur Pengendalian Output dan atau Out Put Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Risiko yang dilaksanakan.
5. Dan seterusnya.